

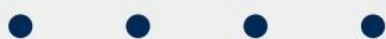


**PEMERINTAH
KABUPATEN
SIGI**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026



**DINAS KESEHATAN
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Periode 2021–2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Sigi dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance and clean government*)

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Bora, Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

dr. Sofyan Mailili, M.Kes
NIP. 196509061 99703 1 002

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Lanadasn Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematikan Penulisan..... | 7 |
| BAB II..... | 11 |
| GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN..... | 11 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan..... | 11 |
| 2.1.1 Tugas..... | 11 |
| 2.1.2 Fungsi..... | 11 |
| 2.1.3 Struktor Organisasi..... | 11 |
| 2.2 Sumberdaya..... | 18 |
| 2.2.1 Susunan Kepegawaian (Aparatur)..... | 18 |
| 2.2.2 Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)..... | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan..... | 20 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... | 27 |
| BAB III..... | 31 |
| PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 31 |
| DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI..... | 31 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi 31 | 31 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 31 |
| 3.3 . Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... | 33 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 35 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 35 |
| 3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis..... | 36 |
| 3.5.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan..... | 42 |
| 3.5.3 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan..... | 43 |
| BAB IV..... | 44 |
| TUJUAN DAN SASARAN..... | 44 |
| 4.1 Tujuan dan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 44 |
| BAB V..... | 46 |

| | |
|---|----|
| STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 46 |
| BAB VI | 48 |
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 48 |
| BAB VII..... | 54 |
| KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 54 |
| BAB VIII..... | 55 |
| PENUTUP..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Dinas Kesehatan perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah..

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen yang disusun bersifat indikatif yang memuat program kegiatan bidang kesehatan yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategi yang tersusun digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan secara menyeluruh dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2021-2026. Gambaran Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi terlepas dari rencana strategis nasional maupun propinsi. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi disamping dapat mengakomodir program kegiatan nasional yang dilaksanakan di daerah juga menjadi arah pelaksanaan program kegiatan daerah guna mendukung tercapainya pembangunan bidang kesehatan berdasarkan visi misi Dinas Kesehatan yang berimplikasi pada pencapaian sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya SKPD untuk berimprovisasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis yang hasilnya tidak saja diukur secara konvensional melainkan harus diukur secara komprehensif. Disamping itu desentralisasi lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh

kapabilitas daripada komponen maupun institusi pemerintah daerah.

Fungsi dibuatnya Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 khususnya berkaitan dengan Tupoksi Dinas. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Adapun keterkaitan Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

RPJMD Kabupaten dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah Kabupaten Sigi yang merupakan acuan utama yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026.

Renstra K/L dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Dokumen Renstra K/L yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan teknis dalam bidang kesehatan yang merupakan kebijakan pembangunan kesehatan jangka waktu 5 tahunan. Dalam penyusunan dokumen renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, dokumen renstra Kementerian Kesehatan juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun guna meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen renstra ini pula yang digunakan dalam penyusunan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi tahun 2021-2026.

Keterkaitan Renstra dengan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai derivasi Rencana Strategis dan memuat rencana kegiatan pembangunan Kesehatan tahunan. Dikaitkan dengan sistem perencanaan pembangunan Kesehatan maka keberadaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi ini merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dalam menjalankan agenda pembangunan kesehatan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dengan SDG's

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 mengacu pula pada SDG's Kementerian Kesehatan yang merupakan target dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam bidang kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 160-104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6133);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

31. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
32. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
35. Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 28);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 adalah Sebagai acuan untuk pelaksanaan misi 1 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan yang mendesak diagendakan. Renstra ini juga diharapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kesehatan.
2. Menggambarkan kondisi umum pelayanan Dinas Kesehatan saat ini dan menjadi indikator pelayanan kesehatan secara menyeluruh serta sekaligus memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan.
3. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas

dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Resntra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Gambaran Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SKPD.

2.2 Sumberdaya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Memuat tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran//target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator MDGs atau Indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Resntra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menguraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1) gambaran pelayanan SKPD; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota; 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan Kab. Sigi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sigi

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan Bupati
- b. Sekretaris
Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang pejabat sekretaris yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai *tugas* memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan & Program
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan di bidang upaya kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang upaya kesehatan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat;
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut upaya kesehatan masyarakat;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya;
- 5) Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- 6) Melakukan penilaian atas kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:

- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga, perbaikan gizi dan peningkatan mutu pelayanan primer
- b) Seksi Promosi Kesehatan, Rujukan, Pengobatan Tradisional dan Komplementer

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, kesehatan olahraga dan kesehatan kerja

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK)

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pengendalian penyakit, tular vektor dan zoonotik, surveilans epidemiologi dan karantina serta narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), Kepala Bidang Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) mempunyai tugas:

- 1) menyusun program kerja tahunan dan rencana anggaran bidang;
- 2) mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi dalam menyelenggarakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit, surveilans epidemiologi dan karantina serta narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- 3) merumuskan rencana tindak lanjut pengendalian masalah kesehatan;
- 4) memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- 5) melakukan penilaian atas kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- 6) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) dibantu oleh:

- a) Seksi Surveilans Epidemiologi Dan Karantina
- b) Seksi Pengendalian Penyakit, Tular Vektor Dan Zoonotik (P2TVZ)
- c) Seksi Penyakit Tidak Menular Dan Upaya Kesehatan Jiwa Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

e. Bidang Jaminan Farmasi dan Sarana Prasarana Kesehatan

Bidang Jaminan Farmasi dan Sarana Prasarana Kesehatan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Jaminan Farmasi dan Sarana Prasarana Kesehatan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pengembangan jaminan kesehatan, farmasi, dan sarana prasarana kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan dan dokumen PERDA dan atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan semesta dalam program jaminan kesehatan;
- 2) Melakukan upaya sosialisasi dan advokasi kepada pengambil kebijakan di daerah dalam rangka melaksanakan jaminan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta diseminasi informasi tentang jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh stakeholder;
- 4) Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan;
- 5) Mengkoordinasikan pelayanan perizinan kepada stekholder pelayanan kesehatan baik milik swasta maupun pemerintah;
- 6) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kefarmasian serta pengawasan obat dan makanan (POM);
- 7) Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat dan alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Jaminan Farmasi dan Sarana Prasarana Kesehatan dibantu oleh:

- a) Seksi Jaminan Kesehatan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana kesehatan
 - c) Seksi Kefarmasian dan alat kesehatan
- f. Bidang Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Bidang Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendayagunaan dan pemberdayaan manusia kesehatan serta peningkatan kompetensi dan pengembangan tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan dokumen yang berkaitan dengan pengembangan SDM
- 2) Menyusun rencana Bidang Pengembangan SDM Kesehatan sesuai dengan rencana kerja dinas
- 3) Melakukan upaya sosialisasi dan advokasi kepada pengambil kebijakan di daerah dalam rangka melaksanakan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta diseminasi informasi tentang upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan kepada seluruh *stakeholder*;
- 5) Mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi perizinan tenaga kesehatan kepada *stakeholder*
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 7) memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- 8) melakukan penilaian atas kinerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas;
- 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan terdiri dari:

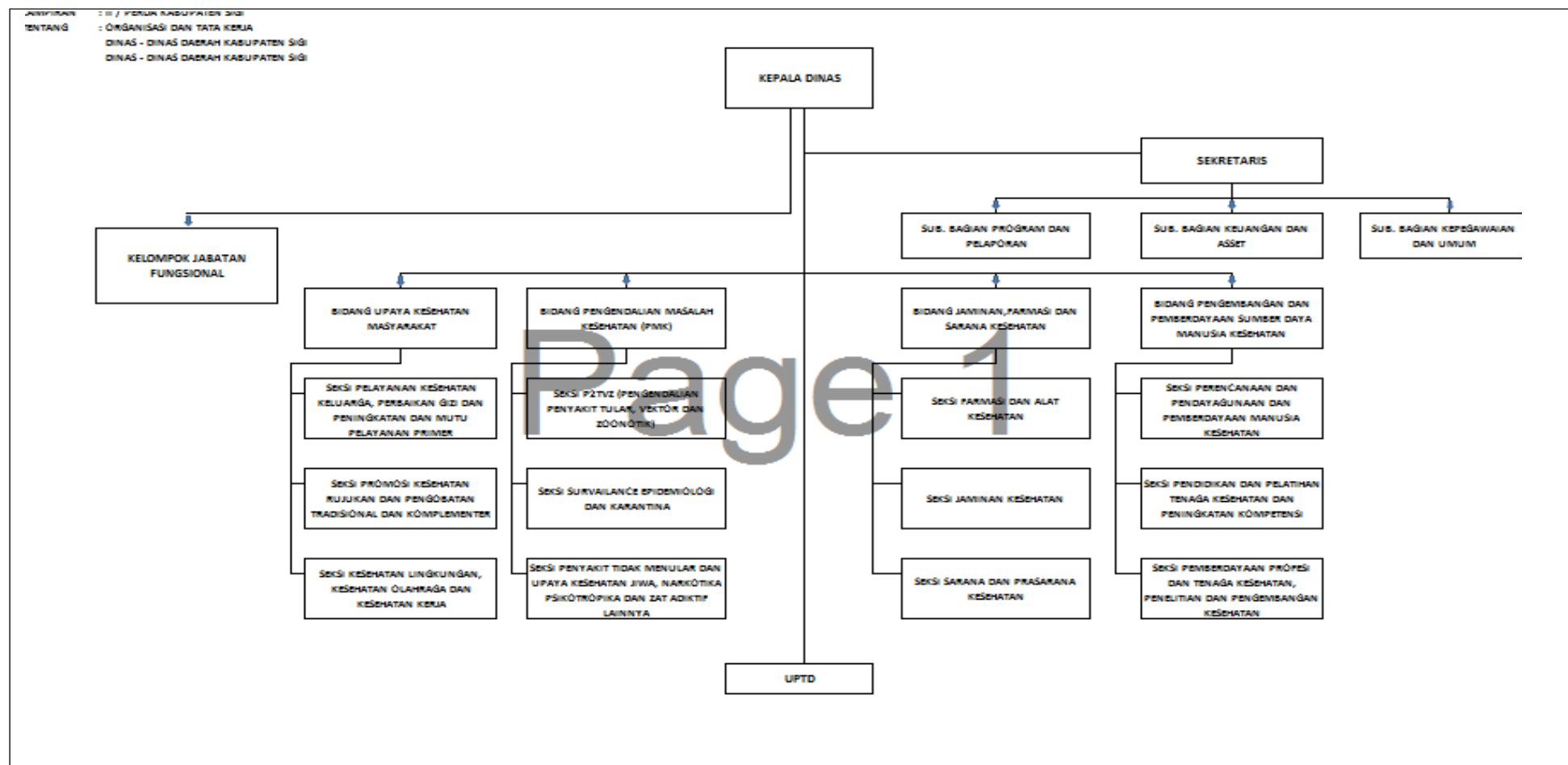
- a) Seksi Perencanaan Pendayagunaan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Seksi Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan, Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
 - c) Seksi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS KESEHATAN
Jalan: Poros Palu-Palolo Desa Bora Kec. Sigi Biromaru

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2021



2.2 Sumberdaya

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Susunan Kepegawaian (Aparatur)

Jumlah Aparatur di Dinas Kesehatan Sebanyak 119 Orang terdiri :

e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 49 Orang

f. Pegawai Harian Lepas (PHL) : 70 Orang

Berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|------------|
| a. Pendidikan Magister | : 5 Orang |
| b. Sarjana Non Kesehatan | : 14 Orang |
| c. Dokter Umum | : 1 Orang |
| d. Dokter Gigi | - |
| e. S1 Keperawatan | : 4 Orang |
| f. Sarjana Kesehatan Masyarakat | : 40 Orang |
| g. Sarjana Farmasi | : 8 Orang |
| h. Sarjana Gizi | : 3 Orang |
| i. DIV Keperawatan | 1 Orang |
| j. DIV Kebidanan | : 3 Orang |
| k. DIII Kebidanan | : 8 Orang |
| l. DIII Keperawatan | : 9 Orang |
| m. DIII Farmasi | : 2 Orang |
| n. DIII Gizi | : 1 Orang |
| m. DII Kesehatan Lingkungan | : 5 Orang |
| n. DIII Perawat Gigi | : - |
| o. DIII Rekam Medik | : 1 Orang |
| p. SPPH | : - |
| q. SPK | : - |
| r. DI Bidan | : - |
| s. SMA | : 14 Orang |

Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Golongan I : -
- b. Golongan II : 5 Orang
- c. Golongan III : 41 Orang
- d. Golongan IV : 3 Orang

Berdasarkan jabatan (eselon) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Non Eselon : 104 Orang
- b. Eselon IV : 12 Orang
- c. Eselon III : 2 Orang
- d. Eselon II : 1 Orang

Jumlah Aparatur Di Puskesmas terdiri dari :

| No. | Puskesmas | Jumlah |
|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Biromaru | 68 Orang |
| 2. | Dolo | 55 Orang |
| 3. | Kaleke | 45 Orang |
| 4. | Baluase | 25 Orang |
| 5. | Marawola | 45 Orang |
| 6. | Tinggede | 41 Orang |
| 7. | Kamaipura | 17 Orang |
| 8. | Pandere | 28 Orang |
| 9. | Kulawi | 33 orang |
| 10. | Towulu | 6 Orang |
| 11. | Kantewu | 14 Orang |
| 12. | Banasu | 7 Orang |
| 13. | Gimpu | 23 Orang |
| 14. | Lindu | 16 Orang |
| 15. | Kinovaro | 29 Orang |
| 16. | Dombusoi | 25 Orang |
| 17. | Palolo | 41 Orang |
| 18. | Banpres | 24 Orang |
| 19. | Nokilalaki | 11 Orang |
| T O T A L | | 553 Orang |

2.2.2 Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung.

| No | Sarana dan Prasarana | Kepemilikan | Jumlah |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Rumah Sakit | Pemerintah | 1 |
| 2. | Puskesmas: | Pemerintah | 19 |
| | a. Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 10 |
| | b. Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 9 |
| 3. | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 48 |
| 4. | Poskesdes | Pemerintah | 120 |
| 5. | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 20 |
| 6. | Gudang Farmasi | Pemerintah | 16 |
| 7. | Apotik | Pemerintah | 11 |
| 8. | Toko Obat Berizin | Swasta | 5 |
| TOTAL | | | 259 |

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Sigi selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada 2 aspek yaitu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan serta anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan yang tercantum pada tabel Tc.23 dan Tc.24 berikut.

| Tabel T-C.23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------------------|---------|--|----------------|----------------|------|------|----------------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------------|-------|---------|--------|-------|
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KABUPATEN SIGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Satuan | Target indikator Perangkat Daerah Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio capaian pada Tahun ke | | | | |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Perilaku sehat masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase masyarakat sadar terhadap cara hidup sehat (ber-PHBS) | | | | % | 62 | 65 | 68 | | | 41,67 | 43,05 | 50 | | | | 67,21 | 66,13 | 73,15 | |
| | Jumlah Desa Siaga | | | | Desa | 159 | 163 | 169 | | | 165 | 165 | 168 | | | | 104 | 101 | 99,41 | |
| B | Kualitas sarana dan prasarana kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah puskesmas yang terakreditasi | | | | Unit | - | 9 | 13 | | | 0 | 6 | 11 | | | | - | 66,67 | 84,62 | |
| 2 | Jumlah puskesmas keliling roda 4 yg melayani masy. di kecamatan | | | | Unit | 22 | 25 | 30 | | | 20 | 24 | 28 | | | | 90,91 | 96,00 | 93,33 | |
| b | 3 | Jumlah amulance yang melayani masyarakat | | | Unit | 4 | 4 | 15 | | | 7 | 2 | 14 | | | | 175 | 50,00 | 93,33 | |
| b | 4 | Jumlah Mobil Jenazah yang melayani masyarakat | | | Unit | 2 | 4 | 8 | | | 4 | 4 | 10 | | | | 200 | 100 | 125 | |
| 5 | Rasio tenaga medis | | | | 1/1000 | 20/100.000 | 25/100.000 | 30/100.000 | | | 14/100.000 | 16/100.000 | 18/100.000 | | | | 70,00 | 64,00 | 60,00 | |
| C | aksebilitas air minum dan sanitasi yang layak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak | | | | % | 69,23 | 77,80 | 85,20 | | | 55,22 | 77,2 | 78,19 | | | | 79,76 | 99,23 | 91,77 | |
| 2 | Persentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak | | | | % | 74 | 80,00 | 86,50 | | | 47,37 | 57,47 | 67,47 | | | | 63,64 | 71,84 | 78,00 | |
| D | Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | | | | 0/00 KH | 20/1.000 KH | 18/1.000 KH | 16/1.000 KH | | | 1/1.000 KH | 1/1.000 KH | 1/1.000 KH | | | | 95,00 | 94,44 | 93,75 | |
| 2 | Angka kematian balita | | | | 0/00 KH | 30/1.000 KH | 28/1.000 KH | 26/1.000 KH | | | 0.50/1.000 KH | 0/1.000 KH | 0/1.000 KH | | | | 98,33 | 100 | 100 | |
| 3 | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | | | | 0/00 KH | 200/100.000 KH | 200/100.000 KH | 180/100.000 KH | | | 198/100.000 KH | 230/100.000 KH | 145/100.000 KH | | | | 1,00 | (15,00) | 19,44 | |
| 4 | Persentase balita gizi buruk | | | | % | 1 | 1 | 1 | | | 0,14 | 0,18 | 0,18 | | | | 14,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 84,65 | 96,77 | 81,17 | | | | 84,65 | 96,77 | 81,17 | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 80,71 | 85,59 | 79,99 | | | | 80,71 | 85,59 | 79,99 | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 92 | 86,41 | | | | 100 | 92,00 | 86,41 | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Balita | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 90,94 | 100 | 89,4 | | | | 90,94 | 100 | 89,40 | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 79,99 | 53,05 | 52,29 | | | | 79,99 | 53,05 | 52,29 | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 52,61 | 52,61 | 18,95 | | | | 52,61 | 52,61 | 18,95 | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 46,15 | 45,99 | 88,89 | | | | 46,15 | 45,99 | 88,89 | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 32,05 | 50,57 | 100 | | | | 32,05 | 50,57 | 100 | |
| 13 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 34,83 | 34,83 | 95,76 | | | | 34,83 | 34,83 | 95,76 | |
| 14 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 43,83 | 43,83 | 82,67 | | | | 43,83 | 43,83 | 82,67 | |
| 15 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 53,62 | | | | 100 | 100 | 53,62 | |
| 16 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 34,01 | 34,01 | 57,04 | | | | 34,01 | 34,01 | 57,04 | |
| E | Perlindungan finansial masyarakat miskin dlm pelayanan kesehatan yang maksimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan | | | | % | 100 | 100 | 100 | | | 62,34 | 72,37 | 78,66 | | | | 62,34 | 72,37 | 78,66 | |
| F | Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase tenaga paramedis sesuai standar kompetensi | | | | % | 27,18 | 32,43 | 45,40 | | | 17,78 | 27,78 | 73,67 | | | | - | 85,66 | 162,26 | |
| | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin | | | | % | 18,00 | 20,00 | 28,00 | | | 18,37 | 19,37 | 29,37 | | | | - | 96,85 | 104,89 | |
| G | Kinerja pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil yang mendapatkan insentif | | | | Orang | 90 | 100 | 110 | | | 87 | 83 | 100 | | | | 96,67 | 83,00 | 90,91 | |
| H | Kualitas pengelolaan tanaman obat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dan jenis tanaman obat (Toga) | | | | Jenis | 57 | 57 | 61 | | | 40 | 43 | 43 | | | | 70,18 | 75,44 | 70,18 | |
| i | Kualitas Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Keluarga Sehat | | | | Indeks | | | | 80 | | | | | | | | | | | 81,25 |
| 2 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 |
| 3 | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi | | | | % | | | | 100 | | | | | | | | | | | 84,21 |
| 4 | Angka Stunting | | | | % | | | | 34 | | | | | | | | | | | 88,24 |
| 5 | Cakupan Desa Siaga Aktif | | | | % | | | | 85 | | | | | | | | | | | 100 |
| J | Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------|--|-----|--|-----|--|-------|-------|
| 1 | Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk | | | 1/1000 | | 1 | | 0,3 | | 30,00 | |
| | Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per 1000 Penduduk | | | 1/1000 | | | | | | | |
| 2 | Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Pembiayaan Kesehatan | | | % | | 1 | | 1 | | 100 | |
| 3 | | | | | | 95 | | 90 | | 94,74 | |
| K Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | % | | 100 | | 80 | | | 80 |
| | Persentase Puskesmas Terakreditasi | | | % | | 100 | | 100 | | | 100 |
| L Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Desa STBM | | | % | | 105 | | 48 | | | 45,71 |

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayan Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIGI

| Program/Kegiatan | Anggaran pada Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------|------|----------------------------------|------------------|------------------|------|------|--|---------|-------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 290.700.000,00 | 234.875.000,00 | 207.430.520,00 | - | - | 290.700.000,00 | 234.875.000,00 | 207.430.520,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Penyediaan alat tulis kantor | 92.100.000,00 | 94.143.742,00 | 35.000.000,00 | - | - | 92.100.000,00 | 94.143.742,00 | 35.000.000,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 88.659.000,00 | 91.249.491,00 | 41.000.000,00 | - | - | 88.659.000,00 | 91.249.491,00 | 41.000.000,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon | 75.473.005,00 | 81.249.494,00 | 33.500.000,00 | - | - | 75.473.005,00 | 81.249.494,00 | 33.500.000,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 358.408.000,00 | 351.249.494,00 | 317.000.000,00 | - | - | 358.408.000,00 | 348.544.872,90 | 317.000.000,00 | - | - | 100 | 99,23 | 100 | - | - | | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 176.943.304,00 | 155.819.629,00 | 137.000.000,00 | - | - | 176.943.304,00 | 155.804.047,04 | 137.000.000,00 | - | - | 100 | 99,99 | 100 | - | - | | |
| Penyediaan jasa pelayanan operasional perkantoran | 490.275.042,00 | 461.249.494,00 | 441.622.900,00 | - | - | 343.192.529,40 | 389.386.822,83 | 309.136.030,00 | - | - | 70 | 84,42 | 70 | - | - | | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian SKPD | 310.250.000,00 | - | 271.981.288,00 | - | - | 310.250.000,00 | - | 271.981.288,00 | - | - | 100 | #DIV/0! | 100 | - | - | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 11.495.623.862,00 | 8.022.685.312,00 | 8.038.833.665,00 | - | - | 11.056.491.030,47 | 6.194.315.329,40 | 7.731.750.219,00 | - | - | 96,18 | 77,21 | 96,18 | - | - | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1.624.650.000,00 | 124.650.000,00 | 144.650.000,00 | - | - | 1.435.215.810,00 | 118.554.615,00 | 127.783.810,00 | - | - | 88,34 | 95,11 | 88,34 | - | - | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1.741.086.495,00 | 300.000.000,00 | 348.325.000,00 | - | - | 1.538.075.809,68 | 291.210.000,00 | 307.710.305,00 | - | - | 88,34 | 97,07 | 88,34 | - | - | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | 292.335.650,00 | 100.250.000,00 | 102.541.597,00 | - | - | 292.335.650,00 | 89.152.325,00 | 102.541.597,00 | - | - | 100 | 88,93 | 100 | - | - | | |
| Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga kesehatan | 196.572.000,00 | 90.830.000,00 | 91.695.930,00 | - | - | 196.355.770,80 | 86.869.812,00 | 91.595.064,48 | - | - | 99,89 | 95,64 | 99,89 | - | - | | |
| Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan | 358.371.700,00 | 188.571.703,00 | 189.210.693,00 | - | - | 302.895.760,84 | 187.949.416,38 | 159.920.877,72 | - | - | 84,52 | 99,67 | 84,52 | - | - | | |
| Inentif tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS di daerah terpencil dan sangat terpencil | - | 1.200.000.000,00 | 1.212.000.000,00 | - | - | - | 1.152.240.000,00 | 1.113.585.600,00 | - | - | - | 96,02 | 91,88 | - | - | | |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 111.930.000,00 | 61.665.548,00 | 62.282.203,00 | - | - | - | 61.665.548,00 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | | |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 4.255.509.400,00 | 3.782.195.190,00 | 3.820.017.142,00 | - | - | 3.574.627.896,00 | 3.463.356.135,48 | 3.208.814.399,28 | - | - | 84 | 91,57 | 84 | - | - | | |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | 1.909.472.720,00 | 2.153.800.000,00 | 2.257.600.000,00 | - | - | 1.443.370.429,05 | 1.874.667.520,00 | 1.706.519.840,00 | - | - | 75,59 | 87,04 | 75,59 | - | - | | |
| Revitalisasi sistem kesehatan | 155.001.325,00 | 112.800.000,00 | 142.600.000,00 | - | - | 150.785.288,96 | 112.766.160,00 | 138.721.280,00 | - | - | 99,28 | 99,97 | 97,28 | - | - | | |
| Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan | 100.000.000,00 | 85.000.000,00 | 98.000.000,00 | - | - | 100.000.000,00 | 59.891.000,00 | 98.000.000,00 | - | - | 100 | 70,46 | 100 | - | - | | |
| Peningkatan kesehatan masyarakat | 259.472.720,00 | 153.650.993,00 | 81.725.497,00 | - | - | 256.333.100,09 | 147.781.525,07 | 80.736.618,49 | - | - | 98,79 | 96,18 | 98,79 | - | - | | |
| Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana | 339.472.720,00 | 173.800.000,00 | 203.600.000,00 | - | - | 265.094.247,05 | 115.837.700,00 | 158.991.240,00 | - | - | 78,09 | 66,65 | 78,09 | - | - | | |
| Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 176.019.720,00 | 113.800.000,00 | 144.600.000,00 | - | - | 102.918.730,28 | 108.405.880,00 | 84.547.620,00 | - | - | 58,47 | 95,26 | 58,47 | - | - | | |
| Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan | 2.559.704.005,00 | 5.111.000.000,00 | 5.111.000.000,00 | - | - | 1.320.807.266,58 | 4.904.004.500,00 | 2.637.276.000,00 | - | - | 51,6 | 95,95 | 51,6 | - | - | | |
| Upaya Kesehatan Rujukan Rumah Sakit | 180.000.000,00 | 150.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | - | 178.992.000,00 | 148.770.000,00 | 79.552.000,00 | - | - | 99,44 | 99,18 | 99,44 | - | - | | |
| Peningkatan Kesehatan Olahraga | - | - | 80.862.748,00 | - | - | - | - | 79.350.614,61 | - | - | - | - | 98,13 | - | - | | |
| Peningkatan Kesehatan Kerja | - | - | 80.862.748,00 | - | - | - | - | 80.862.748,00 | - | - | - | - | 100 | - | - | | |
| Jaminan persalinan (JAMPERSAL) | 2.152.352.250,00 | 2.152.352.250,00 | 2.152.342.250,00 | - | - | 1.030.761.492,53 | 984.485.919,15 | 1.030.756.703,53 | - | - | 47,89 | 45,74 | 47,89 | - | - | | |
| Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi) | 5.529.718.939,00 | 7.829.718.939,00 | 7.829.718.939,00 | - | - | 5.529.718.939,00 | 7.829.718.939,00 | 7.829.718.939,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama Rujukan dan persalinan (Klaim) | 731.026.133,00 | 1.290.893.958,00 | 1.257.172.120,00 | - | - | 731.026.133,00 | 1.290.893.958,00 | 1.257.172.120,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | |
| Pendidikan Gratis dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi ke Jenjang Pendidikan Tinggi Jurusan Khusus Kesehatan | - | 411.934.532,00 | 416.053.877,00 | - | - | - | 411.934.532,00 | 413.058.289,09 | - | - | - | 100 | 99,28 | - | - | | |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 84.687.500,00 | 84.187.500,00 | 85.178.854,00 | - | - | 84.611.281,25 | 84.187.500,00 | 85.102.193,03 | - | - | 99,91 | 100 | 99,91 | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|---|---|
| | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | 96.800.100,00 | 96.311.500,00 | 97.210.000,00 | - | - | 92.598.975,66 | 96.195.926,20 | 92.991.086,00 | - | 95,66 | 99,88 | 95,66 | - | - |
| | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | 220.805.904,00 | 220.316.904,00 | 221.863.700,00 | - | - | 204.532.508,88 | 210.424.675,01 | 205.512.345,31 | - | 92,63 | 95,51 | 92,63 | - | - |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 40.270.100,00 | 41.407.932,00 | 42.393.520,00 | - | - | 40.270.100,00 | 41.035.260,61 | 42.393.520,00 | - | 100 | 99,1 | 100 | - | - |
| | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | 150.904.700,00 | 179.670.500,00 | 180.640.517,00 | - | - | 150.904.700,00 | 176.364.562,80 | 180.640.517,00 | - | 100 | 98,16 | 100 | - | - |
| | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | 65.000.000,00 | 71.915.965,00 | 72.628.800,00 | - | - | 64.935.000,00 | 71.793.707,86 | 72.556.171,20 | - | 99,9 | 99,83 | 99,9 | - | - |
| | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | 55.484.950,00 | 65.284.950,00 | 66.770.812,00 | - | - | 54.247.635,62 | 65.284.950,00 | 65.281.822,89 | - | 97,77 | 100 | 97,77 | - | - |
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung | 480.000.000,00 | 354.000.000,00 | 355.000.000,00 | - | - | 180.144.000,00 | 331.910.400,00 | 133.231.500,00 | - | 37,53 | 93,76 | 37,53 | - | - |
| | Peningkatan imunisasi dan vaksinasi | 346.487.000,00 | 248.315.691,00 | 249.251.109,00 | - | - | 320.812.313,30 | 247.645.238,63 | 230.781.601,82 | - | 92,59 | 99,73 | 92,59 | - | - |
| | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan KLB | 176.737.160,00 | 85.980.160,00 | 86.980.160,00 | - | - | 122.567.220,46 | 84.406.723,07 | 60.320.740,96 | - | 69,35 | 98,17 | 69,35 | - | - |
| | Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (i)de) pencegahan dan pemberantasan penyakit | 213.245.931,00 | 100.000.000,00 | 104.947.540,00 | - | - | 164.519.235,77 | 98.260.000,00 | 80.967.027,11 | - | 77,15 | 98,26 | 77,15 | - | - |
| | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | 90.687.755,00 | 93.166.030,00 | 93.564.125,00 | - | - | 90.560.792,14 | 92.923.798,32 | 93.433.135,23 | - | 99,86 | 99,74 | 99,86 | - | - |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 17.753.340,00 | 20.637.373,00 | 21.081.944,00 | - | - | 15.473.811,14 | 20.633.245,53 | 18.375.022,39 | - | 87,16 | 99,98 | 87,16 | - | - |
| | Penyusunan Profil Kesehatan | 28.460.240,00 | 31.585.255,00 | 32.196.476,00 | - | - | 28.315.092,78 | 31.575.779,42 | 32.032.273,97 | - | 99,49 | 99,97 | 99,49 | - | - |
| | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pembangunan puskesmas | 16.278.053.860,00 | 13.068.520.226,00 | 13.199.205.427,00 | - | - | 6.052.180.425,15 | 12.792.774.449,23 | 4.907.464.577,76 | - | 37,18 | 97,89 | 37,18 | - | - |
| | Pembangunan puskesmas pembantu | 2.414.812.700,00 | 2.028.487.668,00 | 2.048.772.545,00 | - | - | 2.414.812.700,00 | 2.014.491.103,09 | 2.048.772.545,00 | - | 100 | 99,31 | 100 | - | - |
| | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | 20.682.490.669,00 | 16.934.226.724,00 | 17.103.568.991,00 | - | - | 20.570.805.219,39 | 15.775.925.616,08 | 17.011.209.718,45 | - | 99,46 | 93,16 | 99,46 | - | - |
| | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | 19.464.000,00 | 16.349.760,00 | 16.513.258,00 | - | - | 19.464.000,00 | 16.240.216,61 | 16.513.258,00 | - | 100 | 99,33 | 100 | - | - |
| | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | 1.104.000.000,00 | 939.960.000,00 | 949.359.600,00 | - | - | 1.104.000.000,00 | 744.166.332,00 | 949.359.600,00 | - | 100 | 79,17 | 100 | - | - |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 197.592.970,00 | 165.978.095,00 | 167.637.876,00 | - | - | 197.592.970,00 | 156.218.583,01 | 167.637.876,00 | - | 100 | 94,12 | 100 | - | - |
| | Pembangunan Rumah Dinas Dokter/Perawat | 2.879.822.000,00 | 2.394.050.480,00 | 2.417.990.985,00 | - | - | 2.879.534.017,80 | 2.350.718.166,31 | 2.417.749.185,90 | - | 99,99 | 98,19 | 99,99 | - | - |
| | Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas | 380.000.000,00 | 319.200.000,00 | 322.392.000,00 | - | - | 379.962.000,00 | 319.200.000,00 | 322.359.760,80 | - | 99,99 | 100 | 99,99 | - | - |
| | Penambahan Ruang rawat inap Puskesmas | 250.000.000,00 | 210.000.000,00 | 212.100.000,00 | - | - | 248.650.000,00 | 87.255.000,00 | 210.954.660,00 | - | 99,46 | 41,55 | 99,46 | - | - |
| | Penambahan ruang puskesmas untuk poli gigi, lab dan gudang obat PKM | 700.000.000,00 | 588.000.000,00 | 593.880.000,00 | - | - | 696.220.000,00 | 567.714.000,00 | 590.673.048,00 | - | 99,46 | 96,55 | 99,46 | - | - |
| | Pelayanan Kesehatan gratis, Puskesmas keliling gratis disetiap kecamatan | 266.500.000,00 | 800.000.000,00 | 808.000.000,00 | - | - | 266.500.000,00 | 780.720.000,00 | 808.000.000,00 | - | 100 | 97,59 | 100 | - | - |
| | Pengadaan Mobil Jenazah (ambulance) Setiap Kecamatan | - | 1.600.000.000,00 | 1.616.000.000,00 | - | - | - | 1.600.000.000,00 | 1.613.091.200,00 | - | - | 100 | 99,82 | - | - |
| | Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di daerah terpencil | - | 1.000.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | - | - | - | 884.300.000,00 | 1.009.899.000,00 | - | - | 88,43 | 99,99 | - | - |
| | Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil | - | 375.000.000,00 | 378.750.000,00 | - | - | - | 372.787.500,00 | 377.727.375,00 | - | - | 99,41 | 99,73 | - | - |
| | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | 69.381.800,00 | 41.193.453,00 | 41.605.388,00 | - | - | 69.381.800,00 | 37.411.894,01 | 41.605.388,00 | - | 100 | 90,82 | 100 | - | - |
| | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Peningkatan Keselamatan Ibu | 152.669.000,00 | 112.039.750,00 | 113.539.750,00 | - | - | 148.440.068,70 | 109.440.427,80 | 110.394.698,93 | - | 97,23 | 97,68 | 97,23 | - | - |
| | Peningkatan Keselamatan Anak | 160.411.179,00 | 104.831.665,00 | 105.500.379,00 | - | - | 159.240.177,39 | 100.732.746,90 | 104.730.226,23 | - | 99,27 | 96,09 | 99,27 | - | - |
| | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 98.499.316,00 | 84.519.468,00 | 85.719.468,00 | - | - | 98.499.316,00 | 84.519.468,00 | 85.719.468,00 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 120.219.300,00 | 113.500.684,00 | 114.139.684,00 | - | - | 117.129.663,99 | 113.023.981,13 | 111.206.294,12 | - | 97,43 | 99,58 | 97,43 | - | - |
| | Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan | 70.994.700,00 | 56.410.000,00 | 57.115.302,00 | - | - | 70.994.700,00 | 56.410.000,00 | 57.115.302,00 | - | 100 | 100 | 100 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu | - | 2.000.000.000,00 | 2.020.000.000,00 | - | - | - | 1.998.200.000,00 | 2.015.556.000,00 | - | - | - | 99,91 | 99,78 | - | - | | | |
| Pelayanan kesehatan gratis penduduk miskin | 5.941.418.499,00 | 5.136.159.983,00 | 5.187.521.583,00 | - | - | 5.941.418.499,00 | 5.133.591.903,01 | 5.187.521.583,00 | - | - | 100 | 99,95 | 100 | - | - | | | |
| Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan pemeliharaan kesehatan | 25.272.300,00 | 13.684.970,00 | 13.888.126,00 | - | - | 25.272.300,00 | 13.684.970,00 | 13.888.126,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | | |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 42.645.500,00 | 31.143.200,00 | 31.388.325,00 | - | - | 42.645.500,00 | 31.143.200,00 | 31.388.325,00 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | | | |
| Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri | - | 2.100.000.000,00 | 2.121.000.000,00 | - | - | - | 2.046.240.000,00 | 1.879.842.300,00 | - | - | - | 97,44 | 88,63 | - | - | | | |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | - | - | - | 3.858.217.313,00 | 3.896.799.486,00 | - | - | - | 3.842.784.443,75 | 3.820.032.536,13 | - | - | - | 99,6 | 98,03 | | | |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | - | - | - | 2.361.220.000,00 | 2.384.832.200,00 | - | - | - | 2.223.796.996,00 | 1.956.277.853,66 | - | - | - | 94,18 | 82,03 | | | |
| Revitalisasi sistem kesehatan | - | - | - | 162.220.000,00 | 163.842.200,00 | - | - | - | 158.667.382,00 | 163.842.200,00 | - | - | - | 97,81 | 100 | | | |
| Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan | - | - | - | 125.000.000,00 | 126.250.000,00 | - | - | - | 125.000.000,00 | 125.063.250,00 | - | - | - | 100 | 99,06 | | | |
| Peningkatan kesehatan masyarakat | - | - | - | 85.660.000,00 | 86.516.600,00 | - | - | - | 85.660.000,00 | 86.516.600,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana | - | - | - | 236.220.000,00 | 238.582.200,00 | - | - | - | 228.448.362,00 | 196.782.598,56 | - | - | - | 96,71 | 82,48 | | | |
| Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | - | - | - | 158.220.000,00 | 159.802.200,00 | - | - | - | 147.714.192,00 | 159.802.200,00 | - | - | - | 93,36 | 100 | | | |
| Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan | - | - | - | 5.111.920.449,00 | 5.163.039.653,00 | - | - | - | 4.775.556.083,46 | 4.485.132.546,56 | - | - | - | 93,42 | 86,87 | | | |
| Peningkatan Kesehatan Kerja | - | - | - | 508.044.416,00 | 513.124.860,00 | - | - | - | 508.044.416,00 | 513.124.860,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Upaya Kesehatan Rujukan Rumah Sakit | - | - | - | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | - | - | - | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Peningkatan Kesehatan Olahraga | - | - | - | 87.830.000,00 | 88.708.300,00 | - | - | - | 87.830.000,00 | 88.708.300,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Jaminan persalinan (JAMPERSAL) | - | - | - | 2.157.352.250,00 | 2.178.925.773,00 | - | - | - | 1.885.094.396,05 | 1.760.136.239,43 | - | - | - | 87,38 | 80,78 | | | |
| Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi) | - | - | - | 7.831.718.939,00 | 7.910.036.128,00 | - | - | - | 6.878.598.744,12 | 5.408.882.704,33 | - | - | - | 87,83 | 68,38 | | | |
| Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama Rujukan dan persalinan (Klaim) | - | - | - | 1.220.093.507,00 | 1.232.294.442,00 | - | - | - | 985.835.553,66 | 285.276.163,32 | - | - | - | 80,8 | 23,15 | | | |
| Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri | - | - | - | 2.142.210.000,00 | 2.163.632.100,00 | - | - | - | 2.142.210.000,00 | 2.163.632.100,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | - | - | - | 86.559.069,00 | 87.419.000,00 | - | - | - | 82.560.040,01 | 87.384.032,40 | - | - | - | 95,38 | 99,96 | | | |
| Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | - | - | - | 114.965.000,00 | 115.773.488,00 | - | - | - | 114.965.000,00 | 115.773.488,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan | - | - | - | 58.020.129,00 | 58.947.152,00 | - | - | - | 58.020.129,00 | 58.947.152,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian tambahan makanan dan vitamin | - | - | - | 86.212.534,00 | 87.362.100,00 | - | - | - | 86.212.534,00 | 87.362.100,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | - | - | - | 98.360.200,00 | 99.412.212,00 | - | - | - | 82.553.715,86 | 87.661.688,54 | - | - | - | 83,93 | 88,18 | | | |
| Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | - | - | - | 222.834.000,00 | 223.899.000,00 | - | - | - | 222.834.000,00 | 223.899.000,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | - | - | - | 181.703.165,00 | 183.178.109,00 | - | - | - | 181.703.165,00 | 183.178.109,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | - | - | - | 73.729.150,00 | 74.770.610,00 | - | - | - | 73.729.150,00 | 74.770.610,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | - | - | - | 67.808.216,00 | 68.524.217,00 | - | - | - | 67.808.216,00 | 68.524.217,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | - | - | 148.310.970,00 | 149.794.080,00 | - | - | - | 148.310.970,00 | 11.069.782,51 | - | - | - | 100 | 7,39 | | | |
| Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan pemeliharaan kesehatan | - | - | - | 45.729.216,00 | 46.186.508,00 | - | - | - | 45.729.216,00 | 46.186.508,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | |
| Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | - | - | - | 42.021.442,00 | 42.441.656,00 | - | - | - | 42.021.442,00 | 42.250.668,55 | - | - | - | 100 | 99,55 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak | - | - | - | 106.814.680,00 | 108.211.231,00 | - | - | - | 106.814.680,00 | 108.211.231,00 | - | - | - | 100 | 100 | | | | |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu | - | - | - | 114.415.851,00 | 115.231.605,00 | - | - | - | 113.912.421,26 | 115.231.605,00 | - | - | - | 99,56 | 100 | | | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | - | - | - | 358.550.000,00 | 359.436.000,00 | - | - | - | 349.657.960,00 | 351.061.141,20 | - | - | - | 97,52 | 97,67 | | | | |
| Peningkatan Imunisasi | - | - | - | 251.743.620,00 | 253.729.633,00 | - | - | - | 247.992.640,06 | 226.910.410,79 | - | - | - | 98,51 | 89,43 | | | | |
| Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | - | - | - | 87.849.962,00 | 91.644.801,00 | - | - | - | 87.849.962,00 | 88.840.470,09 | - | - | - | 100 | 96,94 | | | | |
| Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit | - | - | - | 105.997.016,00 | 107.371.569,00 | - | - | - | 103.463.687,32 | 42.315.135,34 | - | - | - | 97,61 | 39,41 | | | | |
| Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan puskesmas | - | - | - | 21.130.551.817,00 | 21.341.857.336,00 | - | - | - | 20.551.574.697,21 | 21.186.061.777,45 | - | - | - | 97,26 | 99,27 | | | | |
| Pengadaan Kendaraan operasional kesehatan | - | - | - | 2.830.777.500,00 | 2.859.085.275,00 | - | - | - | - | 2.538.867.724,20 | - | - | - | 0 | 88,8 | | | | |
| Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | - | - | - | 17.291.283.071,00 | 17.464.195.902,00 | - | - | - | 16.587.527.850,01 | 16.426.822.665,42 | - | - | - | 95,93 | 94,06 | | | | |
| Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu Menggunakan JAMKESDA | - | - | - | 2.040.200.000,00 | 2.083.580.695,00 | - | - | - | 2.040.200.000,00 | 2.083.163.978,86 | - | - | - | 100 | 99,98 | | | | |
| Kemitraan pengobatan bagi Masyarakat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan | - | - | - | 5.239.396.799,00 | 5.268.812.071,00 | - | - | - | 5.192.242.227,81 | 5.224.554.049,60 | - | - | - | 99,1 | 99,16 | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrasi Tenaga Kesehatan | - | - | - | 191.102.800,00 | 193.013.828,00 | - | - | - | 181.146.344,12 | 193.013.828,00 | - | - | - | 94,79 | 100 | | | | |
| Pendayagunaan Tenaga Kesehatan | - | - | - | 92.612.889,00 | 93.539.018,00 | - | - | - | 92.279.482,60 | 93.539.018,00 | - | - | - | 99,64 | 100 | | | | |
| Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu ke Jenjang Pendidikan Tinggi Jurusan Kesehatan | - | - | - | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | - | - | 400.000.000,00 | 399.040.000,00 | - | - | - | 100 | 99,76 | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) | - | - | - | 103.567.013,00 | 104.602.683,00 | - | - | - | 73.491.152,42 | 104.602.683,00 | - | - | - | 70,96 | 100 | | | | |
| Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil | - | - | - | 824.120.000,00 | 836.361.200,00 | - | - | - | 764.700.948,00 | 744.779.648,60 | - | - | - | 92,79 | 89,05 | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | - | - | 317.000.000,00 | 320.590.000,00 | - | - | - | 317.000.000,00 | 275.515.046,00 | - | - | - | 100 | 85,94 | | | | |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | - | - | - | 135.920.067,00 | 138.903.855,00 | - | - | - | 135.920.067,00 | 117.290.415,16 | - | - | - | 100 | 84,44 | | | | |
| Penyediaan jasa pelayanan operasional perkantoran | - | - | - | 1.046.459.988,00 | 1.054.880.000,00 | - | - | - | 886.246.963,84 | 998.127.456,00 | - | - | - | 84,69 | 94,62 | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | - | - | - | 8.119.222.001,00 | 8.191.320.939,00 | - | - | - | 8.119.222.001,00 | 8.102.854.672,86 | - | - | - | 100 | 98,92 | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | - | - | 146.096.500,00 | 160.168.830,00 | - | - | - | 146.096.500,00 | 160.024.678,05 | - | - | - | 100 | 99,91 | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | - | - | 351.808.250,00 | 351.808.250,00 | - | - | - | 312.792.715,08 | 290.875.061,10 | - | - | - | 88,91 | 82,68 | | | | |
| JUMLAH | 89.972.700.463,00 | 87.005.470.655,00 | 87.875.525.361,00 | 88.647.669.789,00 | 89.532.438.995,00 | 88.947.011.677,72 | 83.403.444.169,88 | 78.086.191.835,78 | 78.816.643.209,40 | 79.603.291.510,45 | 98,86 | 95,86 | 88,86 | 88,91 | 88,91 | | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dikomparasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

| No. | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota | Capaian Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi | Capaian Sasaran Pada Renstra K/L |
|-----|--|---|--|----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) | | 71 | |
| 2. | Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH | 359/100.000 KH | 250/100.000 KH | |
| 3. | Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH | 19/1.000 KH | 20/1.000 KH | |
| 4. | Menurunnya Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | | 10% | |
| 5. | Setiap Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Setiap Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Setiap Bayi Baru Lahir dapat Yankes Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Setiap Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9. | Setiap Anak Pada Usia Pendidikan Dasar dapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 10. | Setiap Warga Negara Indonesia Usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 11. | Setiap Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Dengan Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 12. | Setiap Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 13. | Setiap Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 15. | Setiap Orang Dengan TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM) | ≥80% dikategorikan tercapai 100% | ≥80% dikategorikan tercapai 100% | ≥80% dikategorikan tercapai 100% |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|------|------|
| 16. | Setiap Orang Beresiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar (SPM) | 100% | 100% | 100% |
| 17. | Persentase masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 100% | 1 | |
| 18. | Persentase masyarakat sadar terhadap cara hidup sehat (Ber- PHBS) | 40% | | |
| 19. | Jumlah Desa Siaga | 176 | | |
| 20. | Jumlah puskesmas yang terakreditasi | 19 | | |
| 21. | Jumlah puskesmas keliling R-4 yang melayani masyarakat di kecamatan | 19 | | |
| 22. | Jumlah ambulance keliling (mobil jenazah) yang melayani masyarakat | 15 | | |
| 23. | Rasio tenaga medis di kabupaten sigi | 40 per 100.000 pddk | | |
| 24. | Persentase rumah tangga yang mengakses air minum dan sanitasi | 100% | | |
| 25. | Persentase penurunan penggunaan narkoba | 100% | | |

Dengan melihat komparasi yang demikian maka tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan yang dihadapi pada lima tahun kedepan yaitu :
 - a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan
 - b. Sarana dan prasarana kesehatan belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah
 - c. Biaya pendidikan kesehatan relatif tinggi
 - d. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras
 - e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
 - f. Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal.
2. Peluang yang dihadapi pada lima tahun kedepan yaitu :
 - a. Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan BPJS cukup tinggi
 - b. Prioritas pembangunan Kabupaten Sigi pada Pendidikan dan Kesehatan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
 - d. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program kesehatan seperti pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, gizi, KIA dan sebagainya
 - e. Adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Non fisik Tersedianya dana APBD

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi yang mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan di daerah, baik dari segi merumuskan kebijakan teknis mengelola pelayanan kesehatan di daerah maupun melaksanakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan pencegahan, penyembuhan, pemeliharaan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan melaksanakan upaya-upaya rujukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Beberapa permasalahan yang mengganggu kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi yaitu:

- a. Kurangnya tenaga kesehatan pada daerah terpencil
- b. Peningkatan SDM tenaga kesehatan (umumnya saat masih D1)
- c. Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil untuk layanan kesehatan;
- d. Peningkatan kesadaran tenaga kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi dan anak;
- e. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah (desa dan kecamatan);
- f. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;
- g. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
- h. Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih relatif tinggi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pemerintah daerah Kabupaten Sigi yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Sigi yang Maju, Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan**” keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terhadap Visi tersebut terletak pada Misi ke 1 (satu) yaitu “*Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur*”.Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Sigi Yang Maju, Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan | | | | |
|---|--|---|---|--|
| No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Misi 1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur | | | |
| 2 | Program-Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program Upaya Kesehatan | 1. Rendahnya Disiplin Aparatur 2. Peningkatan Kesehatan masyarakat 3. Kualitas Kesehatan masyarakat belum optimal | 1 Tingkat kedisiplin aparaturnya masih rendah 2 Kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur 3 Jumlah dan mutu tenaga Kesehatan khususnya tenaga strategis (dokter spesialis, dokter | 1 Adanya anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya 2 Adanya pengadaan kendaraan operasional baik R-4 maupun R-2 3 Penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan adanya insentif bagi tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil & sangat terpencil |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Masyarakat</p> <p>7. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</p> <p>8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</p> <p>14. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</p> <p>15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</p> <p>16. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</p> <p>17. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</p> | <p>umum, bidan dan perawat) yang belum merata</p> | |
|---|--|--|

3.3 . Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dinas Kesehatan merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dan Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kot a | Faktor | |
|----|--|--|---|--|
| | | | Pendorong | Penghambat |
| 1. | Meningkatnya kesehatan masyarakat | 1. Rendahnya Disiplin Aparatur | 1. Tingkat kedisiplin aparaturnya masih rendah | 1. Adanya anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya |
| 2. | Meningkatnya pengendalian penyakit | 2. Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat belum memadai | 2. Kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur khusus pada beberapa daerah terpencil dan sangat terpencil | 2. Adanya pengadaan kendaraan operasional baik R-4 maupun R-2 |
| 3. | Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan | 3. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal | 3. Jumlah dan mutu tenaga kesehatan khususnya tenaga strategis (dokter spesialis, | 3. Penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan adanya insentif bagi tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil & sangat terpencil |
| 4. | Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan | | | |
| 5. | Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan | | | |
| 6. | Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga | | | |
| 7. | Meningkatnya daya | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 8. | guna kemitraan dalam dan luar negeri | | dokter umum, bidan dan perawat) yang belum merata | |
| 9. | Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan- evaluasi | | | |
| 10. | Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan | | | |
| 11. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | | | |
| 12. | Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan | | | |
| | Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi | | | |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033, RTRWP digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi berupaya mengsinkronkan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan berdasarkan RTRW dimaksud dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sigi yakni Penanganan Khusus penyakit Endemik Schistosomiasis. Dari hasil analisis terhadap dokumen KLHS Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi lebih terfokus pada peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi untuk lima tahun mendatang adalah:

- a. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya tingkat kerentanan atas penyakit yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap cara hidup sehat;
- b. Masih Tingginya penyakit sistosomiasis di tengah masyarakat serta rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Akses masyarakat miskin dalam menikmati pelayanan kesehatan yang belum maksimal;
- d. Meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat.
- e. Minimnya pelayanan kesehatan yang dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas induk, puskesmas pembantu, serta diposkesdes/polindes

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan diatas, maka dapat dilakukan penelitian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

Tabel 3.3
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

| No | Kekuatan(S/ <i>Strengths</i>) | No | Kelemahan (W/ <i>Weaknesses</i>) |
|----|---|----|--|
| 1. | Adanya program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda | 1. | Anggaran hanya terfokus pada satu program |
| 2. | Adanya dukungan dari pemerintah yaitu pembangunan puskesmas/pustu dan rumah dinas dokter/tenaga medis di daerah terpencil dan sangat terpencil, pengadaan kendaraan R-2 dan R-4 di sarana pelayanan kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil | 2. | Masyarakat sulit menjangkau sarana kesehatan |
| 3. | Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan / mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia kesehatan | 3. | Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola program kesehatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang |
| 4. | Adanya dukungan dana DAK Non Fisik dari pusat seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan(BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) bagi balita gizi buruk | 4. | Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah |
| 5. | Tersedianya dana secara berkesinambungan | 5. | Evaluasi program belum optimal |
| 6. | Adanya Tenaga Penyuluh Kesehatan di setiap puskesmas | 6. | Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal |

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 3.4

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

| No | Peluang(O/ <i>Opportunities</i>) | No | Ancaman(T/ <i>Threats</i>) |
|----|---|----|--|
| 1. | Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan BPJS cukup tinggi | 1. | Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan |
| 2. | Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi pada pendidikan dan kesehatan | 2. | Sarana dan prasarana kesehatan belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah |
| 3. | Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber dayam manusia | 3. | Biaya pendidikan kesehatan relatif tinggi |
| 4. | Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program kesehatan sepertipemberantasan penyakit, promosi kesehatan, gizi, KIA dan sebagainya | 4. | Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras |
| 5. | Adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik | 5. | Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular |
| 6. | Tersedianya Dana APBD | 6. | Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal |

c. Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang serta Kelemahan dengan Ancaman melalui Metode Analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan Visi, Misi dan nilai-nilai organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi

Tabel 3.5

Analisis Strategi Alternatif dan Pilihan Dengan Analisis SWOT

| | Kekuatan (S/<i>Strengths</i>) | Kelemahan(W/ <i>Weaknesses</i>) |
|-----|---|--|
| Ali | Adanya program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda | Anggaran hanya terfokus pada satu program |
| Ale | Adanya dukungan dari pemerintah yaitu pembangunan puskesmas/pustu dan rumah dinas dokter/tenaga medis di daerah terpencil dan sangat terpencil, pengadaan kendaraan R-2 dan R-4 di sarana pelayanan kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil | Masyarakat sulit menjangkau sarana kesehatan |
| | Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan / mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia kesehatan | Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola program kesehatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang |
| | Adanya dukungan dana DAK Non Fisik dari pusat seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan | Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah |

| | | |
|--|---|--|
| | (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) bagi balita gizi buruk | |
| | Tersedianya dana secara berkesinambungan | Evaluasi program belum optimal |
| | Adanya Tenaga Penyuluh Kesehatan di setiap puskesmas | Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal |

| Peluang (O/Opportunities) | (S-O) | (W-T) |
|--|---|--|
| Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan BPJS cukup tinggi | Adanya program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda | Anggaran hanya terfokus pada satu program |
| Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi pada pendidikan dan kesehatan | Adanya dukungan dari pemerintah yaitu pembangunan puskesmas/pustu dan rumah dinas dokter/tenaga medis di daerah terpencil dan sangat terpencil, pengadaan kendaraan R-2 dan R-4 di sarana pelayanan kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil | Masyarakat sulit menjangkau sarana kesehatan |
| Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber dayamasyarakat | Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan / mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan | Kemampuan sumber daya manusia kesehatan sebagai pengelola program kesehatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang |

| | | |
|---|---|--|
| | teknis sumber daya manusia kesehatan | |
| Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program kesehatan sepertipemberantasan penyakit, promosi kesehatan, gizi, KIA dan sebagainya | Adanya dukungan dana DAK Non Fisik dari pusat seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) bagi balita gizi buruk | Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah |
| Adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik | Tersedianya dana secara berkesinambungan | Evaluasi program belum optimal |
| Tersedianya Dana APBD | Tersedianya dana secara berkesinambungan | Evaluasi program belum optimal |
| Ancaman (T/Threats) | (S-T) | (W-T) |
| Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan | Adanya program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program jamkesmas, jampersal dan jamkesda | Realisasi anggaran tidak tepat waktu |
| Sarana dan prasarana kesehatan belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah | Adanya dukungan dari pemerintah yaitu pembangunan puskesmas/pustu dan rumah dinas dokter/tenaga medis di daerah terpencil dan sangat terpencil, pengadaan kendaraan R-2 dan R-4 di sarana pelayanan kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil | Masyarakat sulit menjangkau sarana kesehatan |
| Biaya pendidikan kesehatan | Terbukanya kesempatan untuk | Kemampuan sumber daya |

| | | |
|--|--|--|
| relatif tinggi | meningkatkan/mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia kesehatan | manusia kesehatan sebagai pengelola program kesehatan secara kualitas dan kuantitas masih kurang |
| Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras | Adanya dukungan dana DAK Non Fisik dari pusat seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) bagi balita gizi buruk | Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah |
| Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular | Tersedianya dana secara berkesinambungan | Evaluasi program belum optimal |
| Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal | Adanya Tenaga Penyuluh Kesehatan di setiap puskesmas | Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal |

3.5.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Kabupaten Sigi. Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan. Berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 12 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

2. Ketersediaan anggaran/dana dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
 3. Memanfaatkan dana APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Menerapkan kebijakan nasional dalam mendukung pelaksanaan program//kegiatan
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan BPJS
 6. Mengoptimalkan disiplin kerja petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan
 7. Mengoptimalkan kemampuan SDM kesehatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat
 8. Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor
 9. Mengoptimalkan promosi kesehatan kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari
 10. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan
 11. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
 12. Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM kesehatan
- Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan promosi kesehatan

3.5.3 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM kesehatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat
2. Mengoptimalkan promosi kesehatan kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan komitmen bersama untuk capaian 5 (lima) tahun ke depan dan sepenuhnya dengan mengacu dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu: “KABUPATEN SIGI YANG BERDAYA SAING BERBASIS AGRIBISNIS”

Penjabaran dari visi tersebut adalah gambaran masyarakat kabupaten Sigi di masa depan Sumber daya manusianya unggul melalui peningkatan hidup dalam lingkungan keluarga yang berperilaku sehat mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta berada pada desa siaga aktif untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Kesehatan yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Kesehatan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, bupati dan wakil bupati menetapkan misi bidang kesehatan yaitu: “Memantapkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur“ Untuk mendukung tercapainya visi dan misi, telah ditetapkan berbagai tujuan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, seperti dalam tabel berikut:



Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SIGI

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target Tujuan dan Sasaran pada tahun | | | | |
|----|--|---|------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | Indeks kesehatan | Tahun | 67,61 | 67,77 | 67,93 | 68,09 | 68,25 |
| | | Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan dasar | Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,65 | 70,98 | 71,32 | 71,65 | 71,99 |
| 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembangunan Daerah | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 3,66 | 3,84 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah, murah, mudah dan tepat waktu | Survey Kepuasan Masyarakat | % | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIGI

| VISI | KABUPATEN SIGI YANG BERDAYA SAING BERBASIS AGRIBISNIS | | | |
|-----------------|---|----------|---|--|
| MISI | Memantapkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur; | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| TUJUAN 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | |
| | 1.1. Meningkatkan kualitas Layanan kesehatan dasar | 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan |
| | | 2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | |
| | | 3 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | |
| | | 4 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM) | |
| | | 5 | Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan & Rujukan Tindak Lanjut | |
| | | 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang layak | Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | 2 | Penyediaan obat, vaksin dan Pengawasan Makanan yang bermutu | |
| | | 3 | Pemenuhan Alat Kesehatan yang berkualitas | |
| | | 4 | Meningkatkan Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan yang berkualitas | |
| | | 5 | Melaksanakan Pemenuhan Upaya Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |
| | | 1 | Mendorong terbukanya akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan | 1 Memberikan akses masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan yg maksimal |
| | | | | 2 Memberikan insentif tenaga medis teladan dan berprestasi dan tenaga medis yg berada di daerah terpencil dan sangat terpencil |
| | | | | 3 Meingkatkan layanan mobil ambulance Gratis di kecamatan |
| | | | | 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan |
| | | | | 5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan |
| | | | | 6 Penyediaan tenaga medis di daerah terpencil |
| | | | | Meningkatkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | 2 | Perbaikan kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan |
| | | | | 2 Penyediaan tenaga medis di daerah terpencil |
| | | | | 3 Meingkatkan layanan mobil ambulance Gratis di kecamatan |
| | | | | 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|
| | | | 1 | Pemicuan Sanitasi Berbasis Masyarakat | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat |
| | | | 2 | Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah | Meningkatnya Akses Jamban |
| | | | 3 | Meningkatkan Penggunaan Air bersih yang layak | Meningkatnya Akses Air Bersih |
| | | | 4 | Pengawasan Kualitas Air Bersih | Meningkatnya Kualitas Pengolahan Limbah |
| | | | 5 | Penyediaan Pengelolaan Limbah Medis | |
| | | | 6 | Peningkatan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga | |
| | | | 1 | Peningkatan Perilaku Pola Hidup Sehat Masyarakat yang berkualitas | Meningkatnya Rumah Tangga Sehat |
| | | | 2 | Penyediaan Media Promosi Kesehatan | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi |
| | | | 3 | Pemanfaatan dan budidaya tanaman obat lokal | |
| TUJUAN 2 | Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembangunan Daerah | | | | |
| | 1.1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah, murah, mudah dan tepat waktu | | 1 | Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang berkompetensi | Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan |
| | | | 2 | Mendorong Pengembangan Profesi Tenaga Kesehatan | |
| | | | 3 | Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan | |
| | | | 4 | Menyediakan Dana Pendidikan Kesehatan & Insentif Tenaga Kesehatan | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mendukung program dari Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan merumuskan suatu visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Kabupaten Sigi Sehat Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkeadilan

Misi :

- a. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sigi yang memiliki pengetahuan dan perilaku hidup sehat.
- b. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang prima dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.
- c. Menyediakan pembiayaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sigi pada setiap tingkatan layanan kesehatan (primer, sekunder dan tersier).
- d. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung terlaksananya layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan rujukan balik yang berkualitas di pelayanan primer, sekunder dan tersier.
- f. Menyediakan tenaga kesehatan yang berkompeten di seluruh wilayah Kabupaten Sigi, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- g. Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dengan mendahulukan tenaga kesehatan di daerah sangat terpencil serta memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan institusi pemberi pelayanan kesehatan yang berprestasi.
- h. Menjadikan Kabupaten Sigi sebagai pusat pengolahan pasca panen tanaman obat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIGI

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada tahun awal Perencanaan | Target capaian setiap Tahun | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPPJMD |
|---|---|------|--|--|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Tahun 0 | Tahun 1 | | Tahun 1 | | Tahun 1 | | Tahun 1 | | Tahun 1 | | |
| | | | | | | 2021 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan dasar | | | a. Angka Kematian Bayi | per 1000/pddk | | | 71.234.094.135,03 | | 73.014.946.488,41 | | 74.840.320.150,62 | | 76.711.328.154,38 | | 78.629.111.358,24 | |
| | | | | b. Angka Kematian Ibu | per 1000/pddk | | 32.055.342.360,76 | | 32.856.725.919,78 | | 33.678.144.067,78 | | 34.520.097.669,47 | | 35.383.100.111,21 | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | WIN 10 : - Program unggulan No 2 - mendukung RPB (Penanggulangan Bencana) | Yarakat (IKM) sehatan | % | 90 | 92,25 | 120.577.923.129,27 | 94,56 | 123.592.371.207,50 | 96,92 | 126.682.180.487,69 | 99,34 | 129.849.234.999,88 | 100,00 | 133.095.465.874,88 |
| | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Terakreditasi | % | 100 | 100 | 62.599.078.566,57 | 100 | 64.164.055.530,73 | 100 | 65.768.156.919,00 | 100 | 67.412.360.841,98 | 100 | 69.097.669.863,03 | |
| | | | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit yang dibangun | Unit | 1 | 0 | 13.943.427.742,06 | 0 | 14.292.013.435,62 | 0 | 14.649.313.771,51 | 0 | 15.015.546.615,79 | 0 | 15.390.935.281,19 | |
| | | | Pembangunan Puskesmas | Jumlah puskesmas, pustu yang dibangun | Unit | 2 | 2 | 18.641.738.883,13 | 2 | 19.107.782.355,20 | 2 | 19.585.476.914,08 | 2 | 20.075.113.836,94 | 2 | 20.576.991.682,86 | |
| | | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Klinik Kesehatan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan | Unit | 3 | 3 | 1.859.123.698,94 | 3 | 1.905.601.791,42 | 3 | 1.953.241.836,20 | 3 | 2.002.072.882,11 | 3 | 2.052.124.704,16 | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun | Unit | 8 | 8 | 1.904.483.825,00 | 8 | 1.952.095.920,63 | 8 | 2.000.898.318,64 | 8 | 2.050.920.776,61 | 8 | 2.102.193.796,02 | |
| | | | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas Layanan lokal spesifik | Unit | 10 | 8 | 46.478.092,47 | 6 | 47.640.044,79 | 4 | 48.831.045,91 | 2 | 50.051.822,05 | 0 | 51.303.117,60 | |
| | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Klinik Kesehatan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan lokal spesifik | Unit | 3 | 3 | 251.125.000,00 | 3 | 257.403.125,00 | 3 | 263.838.203,13 | 3 | 270.434.158,20 | 3 | 277.195.012,16 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi | Unit | 19 | 19 | 102.500.000,00 | 19 | 105.062.500,00 | 19 | 107.689.062,50 | 19 | 110.381.289,06 | 19 | 113.140.821,29 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Klinik Kesehatan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan yang direhabilitasi | Unit | 3 | 3 | 184.500.000,00 | 3 | 189.112.500,00 | 3 | 193.840.312,50 | 3 | 198.686.320,31 | 3 | 203.653.478,32 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | 2.323.904.623,68 | 10 | 2.382.002.239,27 | 10 | 2.441.552.295,25 | 10 | 2.502.591.102,63 | 10 | 2.565.155.880,20 | |
| | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | a. Jumlah Public Safety Centre (PSC) 119 | Unit | 1 | 0 | 343.246.875,00 | 0 | 351.828.046,88 | 0 | 360.623.748,05 | 0 | 369.639.341,75 | 0 | 378.880.325,29 | |
| | | | | b. Jumlah Therapeutic Feeding Centre (TFC) | Unit | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | | | c. Jumlah Instalasi Farmasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | a. Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) | Unit | 19 | 4 | 3.989.300.000,00 | 4 | 4.089.032.500,00 | 4 | 4.191.258.312,50 | 4 | 4.296.039.770,31 | 4 | 4.403.440.764,57 | |
| | | | | b. Jumlah Prasarana Air Bersih | Unit | 19 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |
| | | | | c. Jumlah Mobil Promosi Kesehatan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | | | d. Jumlah Mobil Jenazah | Unit | 15 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
| | | | | e. Jumlah Pusling | Unit | 19 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | | | f. Jumlah Ambulans | Unit | 19 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | | | | g. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan | Unit | 20 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | |
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan | Set | 15 | 15 | 6.095.368.264,65 | 15 | 6.247.752.471,27 | 15 | 6.403.946.283,05 | 15 | 6.564.044.940,12 | 15 | 6.728.146.063,63 | |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan | unit | 5 | 5 | 87.125.000,00 | 5 | 89.303.125,00 | 5 | 91.535.703,13 | 5 | 93.824.095,70 | 5 | 96.169.698,10 | |
| | | | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Item Obat dan Vaksin | Item | 80 | 80 | 4.251.942.822,50 | 80 | 4.358.241.393,06 | 80 | 4.467.187.422,89 | 80 | 4.578.877.363,59 | 80 | 4.693.349.297,68 | |
| | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai | Item | 90 | 90 | 8.147.580.054,75 | 90 | 8.351.269.556,12 | 90 | 8.560.051.295,02 | 90 | 8.774.052.577,40 | 90 | 8.993.403.891,83 | |
| | | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasyankes Layak Pakai | Unit | 3 | 3 | 404.924.200,00 | 3 | 415.047.305,00 | 3 | 425.423.487,63 | 3 | 436.059.074,82 | 3 | 446.960.551,69 | |
| | | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Pendukung Fasyankes Layak Pakai | Paket | 1 | 1 | 9.295.618,49 | 1 | 9.528.008,96 | 1 | 9.766.209,18 | 1 | 10.010.364,41 | 1 | 10.260.623,52 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Akes/Alat Penunjang Medik Fasyankes Layak Pakai | Set | 25 | 25 | 13.013.865,89 | 25 | 13.339.212,54 | 25 | 13.672.692,85 | 25 | 14.014.510,17 | 25 | 14.364.872,93 | |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 57.593.049.016,68 | 100 | 59.032.875.242,10 | 100 | 60.508.697.123,15 | 100 | 62.021.414.551,23 | 100 | 63.571.949.915,01 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil terlayani Sesuai Standar | Jiwa | 5284 | 5416 | 864.690.000,00 | 5552 | 886.307.250,00 | 5690 | 908.464.931,25 | 5833 | 931.176.554,53 | 5978 | 954.455.968,39 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin Terlayani sesuai standar | Jiwa | 5043 | 5169 | 3.256.565.066,25 | 5298 | 3.337.979.192,91 | 5431 | 3.421.428.672,73 | 5567 | 3.506.964.389,55 | 5706 | 3.594.638.499,29 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir terlayani sesuai Standar | Jiwa | 4724 | 4842 | 27.060.000,00 | 4963 | 27.736.500,00 | 5087 | 28.429.912,50 | 5214 | 29.140.660,31 | 5345 | 29.869.176,82 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita terlayani sesuai Standar | Jiwa | 21279 | 21811 | 48.243.777,50 | 22356 | 49.449.871,94 | 22915 | 50.686.118,74 | 23488 | 51.953.271,70 | 24075 | 53.252.103,50 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Kls 1 & 7 Terlayani sesuai standar | Jiwa | 18024 | 18475 | 44.553.777,50 | 18936 | 45.667.621,94 | 19410 | 46.809.312,49 | 19895 | 47.979.545,30 | 20393 | 49.179.033,93 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah orang usia 15-59 tahun Terlayani sesuai standar | Jiwa | 36802 | 37722 | 96.338.866,45 | 38665 | 98.747.338,11 | 39632 | 101.216.021,56 | 40623 | 103.746.422,10 | 41638 | 106.340.082,66 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah orang usia 60 tahun keatas Terlayani sesuai standar | Jiwa | 18024 | 18475 | 218.608.694,38 | 18936 | 224.073.911,73 | 19410 | 229.675.759,53 | 19895 | 235.417.653,52 | 20393 | 241.303.094,85 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi Terlayani sesuai standar | Jiwa | 995 | 1020 | 146.714.534,28 | 1045 | 150.382.397,63 | 1072 | 154.141.957,57 | 1098 | 157.995.506,51 | 1126 | 161.945.394,17 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | Jumlah penderita Diabetes Mellitus Terlayani sesuai standar | Jiwa | 12639 | 12955 | 207.129.361,65 | 13279 | 212.307.595,69 | 13611 | 217.615.285,58 | 13951 | 223.055.667,72 | 14300 | 228.632.059,42 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah ODJG berat Terlayani sesuai standar | Jiwa | 490 | 502 | 60.119.325,00 | 515 | 61.622.308,13 | 528 | 63.162.865,83 | 541 | 64.741.937,47 | 554 | 66.360.485,91 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga TBC Terlayani sesuai standar | Jiwa | 3780 | 3875 | 23.062.500,00 | 3971 | 23.639.062,50 | 4071 | 24.230.039,06 | 4172 | 24.835.790,04 | 4277 | 25.456.684,79 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV Terlayani sesuai standar | Jiwa | 7155 | 7334 | 121.718.750,00 | 7517 | 124.761.718,75 | 7705 | 127.880.761,72 | 7898 | 131.077.780,76 | 8095 | 134.354.725,28 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Rasio Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Kecamatan | 15 | 16 | 122.857.091,11 | 16 | 125.928.518,38 | 16 | 129.076.731,34 | 16 | 132.303.649,63 | 16 | 135.611.240,87 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Rasio pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Kasus | 0 | 0 | 95.214.245,61 | 0 | 97.594.601,75 | 0 | 100.034.466,79 | 0 | 102.535.328,46 | 0 | 105.098.711,67 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Kunjungan Balita di Posyandu | Jiwa | 15862 | 16259 | 1.352.970.980,20 | 16665 | 1.386.795.254,71 | 17082 | 1.421.465.136,07 | 17509 | 1.457.001.764,47 | 17946 | 1.493.426.808,59 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | os: Jiwa yg dilayanitotal populasi dikawasan | | 4 | 94.339.155,00 | 4 | 96.697.633,88 | 4 | 99.115.074,72 | 4 | 101.592.951,59 | 4 | 104.132.775,38 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Desa STBM | | | 176 | 2.215.165.700,73 | 176 | 2.270.544.843,24 | 176 | 2.327.308.464,32 | 176 | 2.385.491.175,93 | 176 | 2.445.128.455,33 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Rumah Tangga menerapkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | rt/RTKK os: | 45046 | 46173 | 137.002.412,25 | 47327 | 140.427.472,56 | 48510 | 143.938.159,37 | 49723 | 147.536.613,35 | 50966 | 151.225.028,69 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Klinik Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Yang diintervensi | | | 3 | 18.450.000,00 | 3 | 18.911.250,00 | 4 | 19.384.031,25 | 6 | 19.868.632,03 | 7 | 20.365.347,83 | |
| | | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Kasus | 0 | 0 | 3.265.812.421,50 | 0 | 3.347.457.732,04 | 0 | 3.431.144.175,34 | 0 | 3.516.922.779,72 | 0 | 3.604.845.849,21 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Kali | 2 | 3 | 33.825.000,00 | 3 | 34.670.625,00 | 4 | 35.537.390,63 | 6 | 36.425.825,39 | 7 | 37.336.471,03 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA pada Kelompok Sasaran | Kali | 3 | 4 | 137.595.759,13 | 5 | 141.035.653,10 | 7 | 144.561.544,43 | 9 | 148.175.583,04 | 11 | 151.879.972,62 | |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Kelompok Kesehatan Khusus yang diintervensi | Kelompok | 6 | 8 | 25.112.500,00 | 10 | 25.740.312,50 | 13 | 26.383.820,31 | 17 | 27.043.415,82 | 22 | 27.719.501,22 | |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Kelompok Rentan Masalah Kesehatan yang diintervensi | Kelompok | 12 | 16 | 20.578.562,76 | 20 | 21.093.026,83 | 26 | 21.620.352,50 | 34 | 22.160.861,31 | 45 | 22.714.882,85 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | a. Jumlah Kasus Penyakit Menular yang tertangani | Kasus | 8 | 8 | 276.801.654,88 | 8 | 283.721.696,25 | 8 | 290.814.738,65 | 8 | 298.085.107,12 | 8 | 305.537.234,80 | |
| | | | | | | b. Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular yang tertangani | Kasus | 6 | 6 | 276.801.654,88 | 6 | 283.721.696,25 | 6 | 290.814.738,65 | 6 | 298.085.107,12 | 6 | 305.537.234,80 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jiwa | 218239 | 223695 | 31.524.068.095,65 | 229287 | 32.312.169.798,04 | 235020 | 33.119.974.042,99 | 240895 | 33.947.973.394,07 | 246917 | 34.796.672.728,92 | |
| | | | | | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Kunjungan Screening Kesehatan di Fasyankes dan Sekolah | Kali | 394 | 404 | 55.455.575,00 | 414 | 56.841.964,38 | 424 | 58.263.013,48 | 435 | 59.719.588,82 | 446 | 61.212.578,54 | |
| | | | | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan | Jumlah Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB yang ke Lab Rujukan | Kasus | 0 | 0 | 3.071.427,28 | 0 | 3.148.212,96 | 0 | 3.226.918,28 | 0 | 3.307.591,24 | 0 | 3.390.281,02 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Kecamatan Sehat | Kecamatan | 15 | 3 | 102.650.152,25 | 3 | 105.216.406,06 | 3 | 107.846.816,21 | 3 | 110.542.986,61 | 3 | 113.306.561,28 | |
| | | | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Puskesmas | 19 | 4 | 76.785.681,94 | 4 | 78.705.323,99 | 4 | 80.672.957,09 | 4 | 82.689.781,02 | 4 | 84.757.025,54 | |
| | | | | | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Penelitian Bidang Kesehatan | Dokumen | 5 | 5 | 6.142.854,56 | 5 | 6.296.425,92 | 5 | 6.453.836,57 | 5 | 6.615.182,48 | 5 | 6.780.562,04 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas | Puskesmas | 19 | 19 | 10.529.032.102,03 | 19 | 10.792.257.904,58 | 19 | 11.062.064.352,19 | 19 | 11.338.615.960,99 | 19 | 11.622.081.360,02 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Fasilitas/jenis | 3 | 3 | 839.256.409,53 | 3 | 860.237.819,76 | 3 | 881.743.765,26 | 3 | 903.787.359,39 | 3 | 926.382.043,37 | |
| | | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi | Puskesmas | 19 | 4 | 1.164.826.400,00 | 4 | 1.193.947.060,00 | 4 | 1.223.795.736,50 | 4 | 1.254.390.629,91 | 4 | 1.285.750.395,66 | |
| | | | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Investigasi Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal | Kali | 12 | 12 | 36.857.127,33 | 12 | 37.778.555,51 | 12 | 38.723.019,40 | 12 | 39.691.094,89 | 12 | 40.683.372,26 | |
| | | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) setiap KLB/Wabah | Kali/minggu/kali | 7 | 7 | 67.571.400,11 | 7 | 69.260.685,11 | 7 | 70.992.202,24 | 7 | 72.767.007,29 | 7 | 74.586.182,48 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Sistem Informasi Kesehatan secara online yang terintegrasi difasilitas kesehatan | % | 100 | 100 | 230.868.571,11 | 100 | 236.640.285,38 | 100 | 242.556.292,52 | 100 | 248.620.199,83 | 100 | 254.835.704,83 | |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Laporan Data dan Informasi Kesehatan | Dokumen | 20 | 4 | 17.429.284,68 | 4 | 17.865.016,79 | 4 | 18.311.642,21 | 4 | 18.769.433,27 | 4 | 19.238.669,10 | |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Sistem Data dan Informasi Kesehatan Puskesmas dan Dinkes | Paket | 20 | 4 | 17.429.284,68 | 4 | 17.865.016,79 | 4 | 18.311.642,21 | 4 | 18.769.433,27 | 4 | 19.238.669,10 | |
| | | | | | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Paket | 20 | 4 | 196.010.001,75 | 4 | 200.910.251,79 | 4 | 205.933.008,09 | 4 | 211.081.333,29 | 4 | 216.358.366,62 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi Ijin yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 154.926.974,91 | 100 | 158.800.149,28 | 100 | 162.770.153,02 | 100 | 166.839.406,84 | 100 | 171.010.392,01 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Jumlah Surat Rekomendasi Kepengurusan Izin Operasional Rumah Sakit dan Puskesmas | Dokumen | 20 | 20 | 46.478.092,47 | 20 | 47.640.044,79 | 20 | 48.831.045,91 | 20 | 50.051.822,05 | 20 | 51.303.117,60 | |
| | | | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah sakit dan puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi | RS | 1 | 1 | 69.717.138,71 | 1 | 71.460.067,18 | 1 | 73.246.568,86 | 1 | 75.077.733,08 | 1 | 76.954.676,41 | |
| | | | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Puskesmas yang memiliki sertifikat akreditasi | Puskesmas | 19 | 4 | 18.591.236,99 | 4 | 19.056.017,91 | 4 | 19.532.418,36 | 4 | 20.020.728,82 | 4 | 20.521.247,04 | |
| | | | | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutukan | Jumlah Ketersediaan Dokumen Integrasi PSC 119 | Dokumen | 1 | 1 | 20.140.506,74 | 1 | 20.644.019,41 | 1 | 21.160.119,89 | 1 | 21.689.122,89 | 1 | 22.231.350,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---------|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen SOP Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dokumen | 50 | 58 | 8.491.010,35 | 66 | 8.703.285,61 | 76 | 8.920.867,75 | 87 | 9.143.889,45 | 101 | 9.372.486,68 | |
| | | | | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase Stiker pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 59.083.152,50 | 100 | 60.560.231,31 | 100 | 62.074.237,10 | 100 | 63.626.093,02 | 100 | 65.216.745,35 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen SOP Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Lokasi | 127 | 146 | 59.083.152,50 | 168 | 60.560.231,31 | 193 | 62.074.237,10 | 222 | 63.626.093,02 | 255 | 65.216.745,35 | |
| | | | | | Periksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Persentase Kelayakan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | % | 100 | 100 | 21.304.803,11 | 100 | 21.837.423,18 | 100 | 22.383.358,76 | 100 | 22.942.942,73 | 100 | 23.516.516,30 | |
| | | | | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang mendapat pemeriksaan standar kesehatan | Unit | 20 | 23 | 18.757.500,00 | 26 | 19.226.437,50 | 30,4175 | 19.707.098,44 | 34,980125 | 20.199.775,90 | 40,227144 | 20.704.770,30 | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan/pemeriksaan izin Industri Rumah Tangga | Dokumen | 50 | 58 | 2.547.303,11 | 66 | 2.610.985,68 | 76 | 2.676.260,33 | 87 | 2.743.166,83 | 100 | 2.811.746,00 | |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Keluarga Sehat | % | 80 | 84 | 4.061.533.772,53 | 88 | 4.163.072.116,85 | 93 | 4.267.148.919,77 | 97 | 4.373.827.642,76 | 100 | 4.483.173.333,83 | |
| | | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase para pihak yang bermitra WIN 10: - Mendukung RPB (Bencana) | % | 100 | 100 | 3.768.453.678,35 | 100 | 3.862.665.020,31 | 100 | 3.959.231.645,82 | 100 | 4.058.212.436,96 | 100 | 4.159.667.747,89 | |
| | | | | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | bermitra | Lokasi | 20 | 23 | 3.768.453.678,35 | 26 | 3.862.665.020,31 | 30 | 3.959.231.645,82 | 35 | 4.058.212.436,96 | 40 | 4.159.667.747,89 | |
| | | | | | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Desa Sehat | % | 70 | 75 | 254.730.310,61 | 81 | 261.098.568,37 | 87 | 267.626.032,58 | 93 | 274.316.683,40 | 100 | 281.174.600,48 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS | RT/KK | 45046 | 46173 | 254.730.310,61 | 47327 | 261.098.568,37 | 48510 | 267.626.032,58 | 49723 | 274.316.683,40 | 50966 | 281.174.600,48 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas Kesehatan (UKBM) mandiri | % | 234 | 252 | 38.349.783,58 | 270 | 39.308.528,16 | 291 | 40.291.241,37 | 312 | 41.298.522,40 | 336 | 42.330.985,46 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Pos Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Pos | 922 | 922 | 38.349.783,58 | 922 | 39.308.528,16 | 922 | 40.291.241,37 | 922 | 41.298.522,40 | 922 | 42.330.985,46 | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi 2016 – 2021.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut;



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIGI

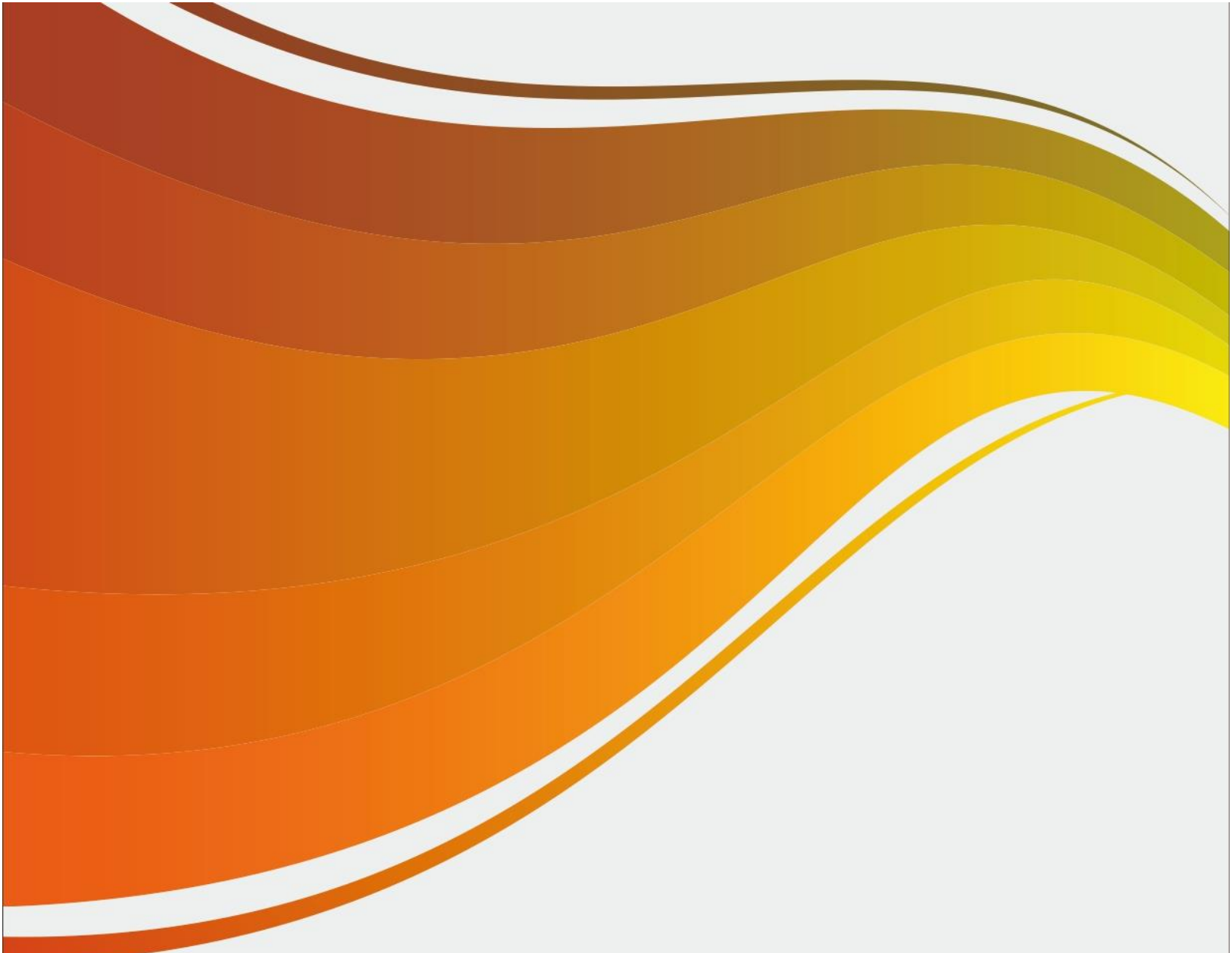
| No | Indikator | Satuan | Kondisi kinerja awal periode RPJMD | Target capaian setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode |
|----|--|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kesehatan | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | a. Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 4 per 1000 Pddk | 5 per 1000 Pddk | 6 per 1000 Pddk | 7 per 1000 Pddk | 8 per 1000 Pddk | 9 per 1000 Pddk | |
| | b. Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Rasio | 7 per 1000 Pddk | 8 per 1000 Pddk | 9 per 1000 Pddk | 10 per 1000 Pddk | 11 per 1000 Pddk | 12 per 1000 Pddk | |
| 3 | a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin yang bermutu | % | 80 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | |
| | b. Persentase Industri Rumah Tangga Produksi Makanan Minuman Yang Sesuai Standar Kesehatan | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Keluarga Sehat | % | 65 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunandan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sigi yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021– 2026.

Semoga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan yaitu “MEMANTAPKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR”.



**PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2021**

